

# ISLAM, NILAI SOSIAL, SIKAP KEBERAGAMAAN DI TENGAH PROBLEM KEBANGSAAN

Muhammad Nuh

## **Abstract**

*Prosperous society is the goal of all religions and purpose of a nation. The spirit of nationality becomes important because of the plurality of the nation of ethnic factors, culture, region, religion, race and class. The spirit of nationality is intended as a spirit, soul and creation activities unity of Indonesia.*

*Keywords : Pluralism, ethnicity, religion, race and class*

## **A. PENDAHULUAN**

Hubungan antarumat beragama di Indonesia tampaknya kembali mengalami cobaan di tengah kebhinekaan dalam negara Pancasila. Tampaknya hal ini akan berlangsung cukup lama dan untuk memulihkan hubungan yang semula tampak harmonis dan kemudian mengalami keretakan bukanlah hal yang mudah karena ujung dari kegagalan pemulihan ini berakibat terpecah-pecahnya kita sebagai bangsa.

Pada hakekatnya sebuah masyarakat heterogen yang sedang tumbuh, seperti bangsa kita tentu sulit mengembangkan saling pengertian yang mendalam antara beraneka ragam unsur-unsur etnis, budaya daerah, bahasa ibu dan kebudayaannya. Kalaupun tidak terjadi salah pengertian mendasar antara unsur-unsur itu, paling tidak tentu saling pengertian yang tercapai barulah bersifat nominal belaka, suasana optimal yang dapat dicapai bukanlah saling pengertian, melainkan sekedar kesalahpahaman. Tata cara hubungan harmonis seperti itu dengan sendirinya tidak memiliki daya tahan yang kokoh terhadap berbagai tekanan yang datang dari perkembangan politik, ekonomi, dan budaya. Kerukunan yang ada hanyalah kondisi yang rapuh, sewaktu waktu dapat tercerai berai yang mungkin dapat diistilahkan dengan ungkapan dari masa perang dingin antara negara-negara adikuasa hidup berdampingan secara damai.

Sudah tentu kedamaian yang terselenggara hanyalah sekedar bertetangga dengan baik, tanpa rasa senasib sepenanggungan diantara orang yang merasa sesama saudara. Hubungan baik yang disifati hanya oleh tata karma dan rasa saling menghormati secara lahiriyah belaka. Persambungan rasa saling memiliki senasib sesama manusia tentu akan sangat sedikit terjadi dalam keadaan demikian.

Perbedaan sikap dan pandangan, apalagi berbenturan kepentingan, dapat membuat ketenangan suasana sewaktu-waktu berubah menjadi kebalauan. Mereka yang tadinya saling menghormati, tiba-tiba dapat bersikap saling menyalahkan. Mereka yang tadinya santun satu sama lain, sekonyong-konyong dapat bersikap saling menyalahkan. Suasana kejiwaan yang dipenuhi rasa terkejut, karena semula keadaan baik-baik saja, menambah intens rasa kehilangan ketenangan semula. Hal itu lalu memperbesar rasa tambah parahnya keadaan, lebih dari kenyataan yang sebenarnya berlangsung.

Masalah pokok kita dalam hubungan antar umat beragama adalah pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan. Kita hanya akan mampu menjadi bangsa yang kokoh, kalau umat agama-agama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya saling menghormati, yang diperlukan adalah rasa saling memiliki (*sens of belonging*), bukannya saling bertenggang rasa satu terhadap yang lain.

Agama merupakan salah satu aspek yang tercantum dalam *International Declaration of Human Rights*. Dalam deklarasi internasional ini, masyarakat dunia harus menjunjung tinggi keberagaman individu, masyarakat, dan bangsa. Setiap individu memiliki hak kebebasan berpikir, berperasaan, dan beragama. Hak yang sangat asasi ini dilandasi dengan kesadaran dan keyakinan diri serta tidak dibenarkan memperoleh tekanan dari siapapun. Sehingga hanya dengan mengedepankan pluralisme hidup rukun dapat tercapai. Akar kata pluralisme adalah "plural". Plural berasal dari bahasa Inggris *plural* bermakna jamak atau lebih dari satu. Dengan demikian pluralisme berarti hal yang mengatakan jamak atau lebih dari satu. Dalam kajian filosofis, pluralisme diberi makna sebagai doktrin bahwa substansi hakiki itu tidak satu (*monoisme*), tidak dua (*dualisme*), akan tetapi banyak (jamak).

Dengan menggunakan dasar pemahaman tentang pluralisme seperti di atas, kita dapat mengidentifikasi sekurang-kurangnya lima ciri utama pluralisme. *Pertama*, selalu berkaitan dengan memelihara dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing kelompok baik pedagang, politisi, pegawai negeri, buruh dan sebagainya akan mempertahankan posisi agar mereka dapat terus memainkan peran yang selama ini mereka merasa menjadi tanggungjawabnya.

*Kedua*, menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Masyarakat yang benar-benar memiliki karakteristik plural benar-benar meyakini bahwa masing-masing pihak berada dalam posisi yang sama. Mereka meyakini bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang unggul dari kelompok masyarakat lain dalam beberapa hal. Sebagai warga negara mempunyai hak, kedudukan, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Perbedaan yang ada bukan dipahami sebagai ancaman terhadap eksistensi suatu kelompok. *Ketiga*, pluralisme menunjukkan kepada wahana untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berkompetensi secara jujur, terbuka dan adil. Karakteristik ini berkaitan dengan upaya menghilangkan pendapat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ada kelompok ordinate yang mendominasi kelompok subordinate, kelompok mayoritas merasa lebih unggul dari kelompok minoritas.

*Keempat*, pluralisme didudukkan pada posisi yang proporsional. Ini berarti bahwa pluralisme dicirikan oleh pandangan-pandangan yang berbeda yang nampak menjadi daya dorong untuk mendinamisasi kehidupan bermasyarakat, dan bukan mekanisme untuk menghancurkan satu kelompok terhadap kelompok lain. Dengan demikian pluralisme ada pada posisi yang netral, tidak memihak dan objektif. *Kelima*, menunjukkan adanya rasa kepemilikan bersama, untuk kepentingan bersama dan diupayakan bersama. Karakteristik semacam ini pada hakikatnya merupakan puncak dari kesadaran bahwa pluralisme sebenarnya merupakan manifestasi jati diri. Kondisi masyarakat saat ini pada posisi yang kritis. Kekritisannya itu nampak dalam perilaku sehari-hari. Salah satu faktor yang kuat mempengaruhi kondisi seperti ini adalah terjadinya proses transisi yang mempersyaratkan perubahan orientasi berpikir, bersikap dan bertindak. Ini sangat sulit ketika proses transisi itu tidak difasilitasi secara memadai melalui berbagai wahana dan upaya.

Proses memahami, menyadari dan memfasilitasi perubahan cara pandang kita terhadap dinamika pluralitas masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan memelihara dan mengembangkan silaturahmi antar sesama manusia. Silaturahmi sebagai salah satu karakteristik model masyarakat yang Islami merupakan kekuatan luar biasa yang harus terus dikembangkan. Dalam Islam, damai bukanlah masalah *international law* (hukum internasional) dan *international relation* (hubungan internasional) antara negara-negara yang kemudian melahirkan negara *super power*

yang arogan kemudian mengklaim diri sebagai polisi dunia, melainkan dimulai dari konsep diri, kemudian meluas ke keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia.

Islam memang cinta damai dan merupakan agama damai. Islam selalu mengajak umatnya untuk bekerja sama dengan umat lain dimanapun berada. Islam mengarahkan kedamaian kepada umatnya dikarenakan, *pertama*, dalam Islam perbedaan dan pluralisme adalah kehendak Allah SWT yang harus terjadi. Usaha untuk mengubah kodrat Allah ini adalah sia-sia. *"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan umat yang satu"* (Hud:118). Jika semua muslim telah sadar bahwa sifat manusia itu berbeda-beda, maka tidak ada alasan baginya untuk saling membenci dan menyakiti. *Kedua*, sejak semula Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa perbedaan agama, ras, dan keturunan adalah bukan satu halangan untuk berbuat baik dan berlaku adil satu sama lain. Akan tetapi, bila sampai umat lain sengaja memusuhi dan memerangi muslim, maka adalah satu kewajiban baginya untuk membela diri. *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil"* (Q.S.60:8).

Dari sini bisa disimpulkan pula bahwa ternyata dalam Al-Qur'an, tema-tema kekerasan sangat lemah jika dibanding dengan tema-tema kedamaian yang merupakan substansi dan makna dasar Islam. Di pihak lain manakala kita dapat mengelola karakteristik yang bersifat plural, tidak tertutup kemungkinan ia mampu menjadi kekuatan luar biasa dalam menumbuhkan dan mengembangkan dinamika dan mobilitas masyarakat sehingga potensi konflik itu bisa diminimalkan atau tidak ada. Meskipun Indonesia bukan negara agama, realitas masyarakat yang agamis di sini menjadikan negara berkepentingan terhadap terciptanya tata kehidupan beragama yang berkualitas, harmonis dan toleran. Meskipun demikian, sebelum tahun 2000 agama sering diletakkan dalam posisi yang tidak proposional. Agama dieksploitasi sedemikian rupa dan dijadikan alat legitimasi politik kekuasaan. Intervensi negara terhadap agama telah memunculkan ketegangan-ketegangan mubazir antara negara dan masyarakat agama disatu sisi dan antara masyarakat agama yang satu dengan masyarakat agama yang lain disisi lain. Eksploitasi dan intervensi tersebut juga berakibat pada lahirnya ekspresi keagamaan yang timpang dan acap kali destruktif.

Kemajemukan agama di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius karena hal ini sangat potensial memicu konflik, bahkan salah satu titik rawan yang memunculkan ancaman disintegrasi bangsa. Program pluralisme dalam bentuk kerukunan antar umat beragama yang selama ini dijalankan tampaknya masih sebatas wacana intelektual dan wacana politis para elit agama dan penguasa. Pentingnya dialog dan hubungan harmonis umat beragama belum mampu menyentuh kesadaran kolektif masyarakat dan masih sebatas wacana formal. Indikatornya adalah masih rentannya masyarakat agama terhadap isu-isu agama dan sara serta masih maraknya konflik-konflik yang melibatkan sentiment agama. Partisipasi kaum agama-agama dalam menyelesaikan konflik sosial juga belum berada dalam level aliansi, aksi dan konseptual strategis dan kajian pluralisme harus lebih ditingkatkan lagi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Sikap Keberagamaan dan Problem Kebangsaan**

Agama memiliki ajaran baik dan ideal bagi manusia. Semua agama memiliki gagasan dasar atau pesan suci sama yaitu penyelamatan kehidupan manusia.

Gagasan dasar ini merupakan inti setiap agama dan menjadi norma abadi yang hidup dalam setiap jantung agama. Implikasinya, *power* agama (dan pemeluknya) sebagai *agent of social change* senantiasa dinanti dalam turut mengentaskan aneka problem yang dihadapi manusia. Tetapi agama juga sering muncul dalam wajah menyeramkan sebagai salah satu sumber potensi konflik. Ketika terjadi kesenjangan antara nilai ideal agama dengan sikap para pemeluknya. Ini tentu berkaitan dengan kelihaihan para pemeluk agama untuk mensinergikan antara nilai ideal yang mereka yakini dengan sejumlah persoalan dan problem yang dihadapi. Agama yang kita peluk saat ini memang telah berkembang pesat, tidak lagi sebagaimana pada era Muhammad, Isa al-Masih, Sidharta Gautama dan para pendahulu dan pendirinya. Tantangan dan problem yang dihadapi agama saat ini belum pernah muncul di saat pendiri agama tersebut masih hidup. Maka, rekonstruksi dan memberikan tafsir agama terhadap realitas kekinian merupakan sebuah keniscayaan belaka dalam rangka menghidupkan kembali kebermaknaan agama. Ada sebuah pergeseran yang luar biasa dalam memahami dan menangkap makna agama. Agama tidak hanya dijadikan sebagai ritualitas personal dengan Tuhan, tetapi juga diharap mampu memberikan tindakan-tindakan solutif terhadap aneka problem yang dihadapi masyarakat saat itu. Agama memberikan panduan moral dan spiritual untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Menghadapi konteks yang berubah tersebut, beberapa pemeluk memandang agama sebagai hal sakral, angker, suci dan tidak bisa diganggu gugat. Mereka melupakan substansi agama dan terjebak terlalu larut dalam simbol dan ritual agama. Beberapa yang lain memandang diri dan kelompoknya sebagai yang benar, sementara yang lain adalah salah. Bahkan, ketika bersentuhan dengan ranah sosial dan politik dalam kondisi konflik, agama memiliki kecenderungan menguatkan konflik ketika ia dijadikan komoditas. Ia bisa menjadi pemicu, penguat atau pemberi justifikasi bagi konflik.

Terkait dengan problem kebangsaan yang bersumber pada sikap keberagamaan, bahwa problem keagamaan menjadi persoalan paling serius di negeri ini karena seringkali atas nama agama perkelahian, pertumpahan darah dan bunuh-bunuhan terjadi. Keagamaan seseorang merupakan ungkapan yang tidak jarang menumbuhkan ikatan emosional, sehingga rela berkorban demi agamanya, sebagai martir di jalan Tuhan. Inilah yang kemudian menjadi bibit-bibit munculnya radikalisme agama. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam refleksi akhir tahun 2007 juga menyebut bahwa salah satu dari dua problem penting yang muncul sepanjang tahun 2007 adalah aneka tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Namun sebenarnya problem tersebut tidak hanya dalam bentuk kekerasan agama. Kalau kita meperluas cakupan pembahasan kita maka setidaknya dijumpai sejumlah persoalan berikut :

- a. Tantangan nasionalisme dari ideologi agama yang bersifat *sub-state* atau bahkan dari ideologi yang bersifat transnasional seperti romantisme khilafah yang mendiskreditkan nasionalisme.
- b. Belum optimalnya peran agama sebagai motor perubahan sosial dalam mengentaskan berbagai problem sosial seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, korupsi dan lain sebagainya. Agama seakan-akan berhenti pada kisaran tempat ibadah, doa, kitab suci, tetapi gagap ketika berhadapan dengan kemiskinan, korupsi, bencana lingkungan.
- c. Kekerasan dan teror yang mengerucut pada pengabaian hukum positif dan berbagai konflik sosial dibumbui nuansa agama seperti konflik Poso, maraknya sejumlah laskar atau organisasi berlabel agama yang diduga

- menciptakan kekacauan dan teror, penyerangan terhadap rumah ibadah dan kelompok agama lain serta *sweeping* tempat-tempat hiburan.
- d. Ekspresi keberagaman yang sangat beragam terutama terkait dengan kaum-kaum minoritas yang kurang terdengar suaranya dipentas nasional. Alih-alih mendapatkan pengakuan bahwa mereka kaum minoritas seperti Islam Kejawaen dan Islam Sasak, komunitas lainnya seperti Lia Eden di Jakarta dan Jemaat Ahmadiyah.
  - e. Masalah lain seputar keberagaman di tengah keragaman adalah konflik-konflik bernuansa etno-religius di berbagai tempat di Indonesia seperti Poso, Parung. Masalah seperti ini tentu tidak pernah kita harapkan terjadi, selain kerugian materiil dan jiwa, korban paling menderita dari konflik sosial ini adalah kaum perempuan dan anak-anak. Mereka adalah golongan yang menjadi sasaran utama pelampiasan konflik-konflik etno-religius.
  - f. Beragamnya pemahaman tentang pola hubungan Islam dan negara yang pada gilirannya berimplikasi pada berbagai isu sensitif seperti perda syariat, legalitas hukum negara, upaya mempertanyakan ulang persoalan Piagam Jakarta sebagai dasar negara.
  - g. Beragamnya pemahaman tentang pola hubungan Islam dan demokrasi yang pada gilirannya berpengaruh kepada apresiasi terhadap nilai-nilai demokrasi.

### C. PENUTUP

Sikap toleransi merupakan sikap menghargai pendapat dan keyakinan orang lain dari berbagai macam sendi yang berkaitan dengan permasalahan pluralitas agama, budaya dan pendapat yang tidak sejalan dengan kita. Islam sangat mengajarkan umatnya untuk menghormati keyakinan sekaligus memberikan tempat untuk hidup bagi agama lain. Toleran merupakan nilai universal yang dimiliki oleh agama atau keyakinan orang lain sehingga tidak boleh memaksakan keyakinan atau agama orang lain, karena jalan yang benar atau jalan yang sesat telah dimaklumi setiap manusia yang berakal (QS Al Baqarah: 256). Bahkan bila orang menyombongkan diri dengan membanggakan keyakinannya sendiri maka orang tersebut justru akan dipalingkan oleh Allah dari kebenaran (QS Al A'raf : 146) sebaliknya jika toleran, Allah justru akan memberi petunjuk jalan kebenaran (QS Al Jin : 2).

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Mas'ud, (2003) *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta : Gama Media
- Andi Purwono (2008), *Sikap Keberagaman Dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan*, Semarang : Universitas Wahid Hasyim Press
- Bahtiar Effendi (1995) *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, dalam *Prisma* No. 5 Mei 1995, h.5
- HM Said Budairy (1994) *Nahdlatul Ulama Dari Berbagai Sudut Pandang*, Jakarta : Pusat Dokumentasi dan Informasi NU.
- Munawir Sjadzali, *Islam Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI Press, 1990).
- Mudzakir Ali(2008), *Sikap Keberagaman Dalam Memperkokoh Semangat Kebangsaan Menuju Masyarakat Sejahtera*, Semarang : Universitas Wahid Hasyim Press
- Waspodo (2001), *Harmoni Dalam Pluralis*, Jakarta : PT. Moyo Segoro